



Pendampingan Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Fondasi Stabilitas Politik, Kepastian Hukum, Dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Imam Rozikin

Universitas Krisnadwipayana

*Penulis Korespondensi: imam_rozikin@unkris.ac.id

Received: 19 Juli 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Abstrak

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis serta berkelanjutan. Di tengah dinamika sosial, politik, perkembangan teknologi informasi, dan arus globalisasi, penguatan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya wawasan kebangsaan sebagai fondasi stabilitas politik, kepastian hukum, dan ketahanan nasional dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Kegiatan dilaksanakan melalui seminar dan diskusi interaktif. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi peserta terhadap tantangan kehidupan kebangsaan. Materi mencakup wawasan kebangsaan, stabilitas politik, kepastian hukum, ketahanan nasional, serta peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai keterkaitan antara wawasan kebangsaan dengan kehidupan politik, penegakan hukum, persatuan sosial, dan ketahanan nasional. Kegiatan juga mendorong peserta untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, menaati hukum, serta membangun kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab. Penguatan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: wawasan kebangsaan, stabilitas politik, kepastian hukum, ketahanan nasional, Indonesia Emas 2045

Abstract

National insight (*wawasan kebangsaan*) serves as a crucial foundation for building a harmonious and sustainable society, nation, and state. Amidst social and political dynamics, the evolution of information technology, and the currents of globalization, strengthening national insight is vital to enhancing public understanding of the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). This community service activity aims to increase participants' understanding and awareness regarding the importance of national insight as a foundation for political stability, legal certainty, and national resilience in support of achieving "Golden Indonesia 2045." The activity was conducted through seminars and interactive discussions. The methodology included material presentation, discussions, Q&A sessions, and participant reflection on the challenges facing the nation. The material covered national insight, political stability, legal certainty, national resilience, and the role of the community in realizing Golden Indonesia 2045. The results indicate an improvement in participants' understanding of the interconnections between national insight and political life, law enforcement, social unity, and national resilience. The activity also encouraged participants to play an active role in maintaining unity, respecting diversity, obeying the law, and building a responsible society. Continuous strengthening of national insight is essential to foster a collective awareness among the public in facing the various challenges on the path to Golden Indonesia 2045.

Keywords: national insight, political stability, legal certainty, national resilience, Golden Indonesia 2045



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan karakteristik masyarakat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan nasional yang menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan bangsa. Namun demikian, keberagaman juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak berkembang menjadi sumber konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan pada dasarnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan strategisnya dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama. Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat. Informasi dapat disebarluaskan dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, provokasi, polarisasi sosial, dan berbagai bentuk konten yang berpotensi mengganggu kohesi sosial.

Dalam konteks kehidupan demokrasi, stabilitas politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemahaman kebangsaan. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menghormati perbedaan pandangan, menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, serta menjaga kehidupan demokrasi berdasarkan ketentuan hukum. Selain

stabilitas politik, kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Kesadaran hukum dapat tumbuh apabila masyarakat memahami bahwa hukum bukan hanya instrumen penegakan sanksi, tetapi juga mekanisme untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Pada sisi lain, ketahanan nasional membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Ketahanan nasional tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, wawasan kebangsaan perlu ditanamkan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan menghadapi berbagai tantangan nasional.

Indonesia Emas 2045 merupakan visi jangka panjang pembangunan Indonesia menuju satu abad kemerdekaan. Pencapaian visi tersebut memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, berkarakter, adaptif, dan memiliki kesadaran kebangsaan. Pembangunan fisik dan ekonomi perlu berjalan seiring dengan pembangunan karakter dan kesadaran warga negara. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui tema Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Fondasi Stabilitas Politik, Kepastian Hukum, dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 dilaksanakan sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2026. Kegiatan diarahkan untuk memberikan ruang pembelajaran dan diskusi mengenai tantangan kehidupan kebangsaan serta peran masyarakat dalam menjaga persatuan, stabilitas, kepastian hukum, dan ketahanan nasional.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar, pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan

refleksi peserta.

4.1 Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi antara panitia, narasumber, dan peserta. Materi disusun berdasarkan tema kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan kehidupan kebangsaan saat ini.

2. Tahap Pelaksanaan

- Penyelenggara: DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi DKI Jakarta
- Tema: *Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Fondasi Stabilitas Politik, Kepastian Hukum, dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045*
- Bentuk kegiatan: Seminar dan diskusi interaktif.



Gambar 1. Kegiatan seminar

Materi kegiatan diarahkan pada beberapa pokok pembahasan, yaitu:

1. Konsep dan urgensi wawasan kebangsaan.
2. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

masyarakat.

3. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.
4. Wawasan kebangsaan dan stabilitas politik.
5. Kesadaran hukum dan kepastian hukum.
6. Ketahanan nasional menghadapi tantangan lingkungan strategis.
7. Peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan pengalaman berkaitan dengan kehidupan kebangsaan.



Gambar 1. Kegiatan diskusi dan tanya jawab

Diskusi diarahkan agar peserta mampu menghubungkan materi dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dalam diskusi, respons terhadap materi, kemampuan menyampaikan pendapat, serta pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa wawasan kebangsaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai simbol-simbol negara, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Wawasan kebangsaan dapat diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan juga menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia perlu dipandang sebagai bagian dari identitas nasional. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang mampu menerima perbedaan tanpa menghilangkan identitas sebagai satu bangsa Indonesia.

Stabilitas politik merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kegiatan ini dibahas pentingnya masyarakat memahami proses demokrasi dan menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.

Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap hak warga negara lainnya. Masyarakat

juga perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya, khususnya di lingkungan digital.

Dengan demikian, penguatan wawasan kebangsaan dapat menjadi bagian dari pendidikan kewargaan yang mendorong masyarakat untuk menjaga komunikasi sosial dan menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik di tengah perbedaan.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan dibahas bahwa masyarakat perlu memahami hukum sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Kesadaran hukum dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, penghormatan terhadap hak orang lain, penyelesaian permasalahan melalui mekanisme yang tersedia, serta penolakan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penguatan wawasan kebangsaan juga memberikan perspektif bahwa kehidupan bernegara harus dibangun berdasarkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara perlu berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menaati ketentuan hukum.

Ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan kualitas



sumber daya manusia, pemeliharaan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, wawasan kebangsaan menjadi salah satu unsur penting yang membantu masyarakat menempatkan kepentingan individu dalam kerangka kehidupan bersama.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan. Pembangunan sumber daya manusia perlu disertai dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, integritas, serta kepedulian terhadap kehidupan sosial.

Kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman bahwa kontribusi masyarakat terhadap Indonesia Emas 2045 dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Bentuknya antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, bekerja secara produktif, menaati hukum, menjaga persatuan, menggunakan teknologi secara bijaksana, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui interaksi antara narasumber dan peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait

dinamika kehidupan kebangsaan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa isu wawasan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pembahasan tidak hanya berada pada tataran konseptual, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan sosial, perkembangan teknologi informasi, kehidupan demokrasi, kesadaran hukum, dan tantangan pembangunan nasional.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Fondasi Stabilitas Politik, Kepastian Hukum, dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi DKI Jakarta pada 12 Agustus 2026 memberikan ruang pembelajaran dan diskusi mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan nasional, khususnya persatuan sosial, stabilitas kehidupan politik, kesadaran hukum, dan ketahanan nasional. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggung jawab. Penguatan wawasan kebangsaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan karena tantangan kehidupan berbangsa terus berkembang, termasuk akibat perubahan teknologi, arus informasi, dinamika sosial, dan perubahan lingkungan strategis.



Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menghormati perbedaan, menaati hukum, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan tidak hanya membutuhkan kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga masyarakat yang memiliki karakter, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan penguatan wawasan kebangsaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2020 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP.
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Luncurkan rancangan akhir RPJPN 2025–2045, Presiden paparkan visi Indonesia Emas 2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025: Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Pengesahan RUU RPJPN 2025–2045, fondasi penting visi Indonesia Emas 2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
6. Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *FGD pendalaman dan finalisasi RUU RPJPN 2025–2045: Transformasi Indonesia menuju negara maju dan berkelanjutan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
7. Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen tersebut menempatkan RPJMN 2025–2029 sebagai tahap pertama implementasi RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045.
8. Kementerian PPN/Bappenas. (2026). *Laporan background study dan penyusunan awal RPJPN 2025–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
9. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Lemhannas RI penjaga visi bangsa: Strategi kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Press Lemhannas.



10. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Transformasi Lemhannas RI: Memperkokoh ketahanan nasional untuk mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Press Lemhannas.
11. Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
13. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
14. Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU ini menjadi landasan hukum RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang.
15. Suyitno, S. L. P. (2023). Transformasi ekonomi Indonesia: Keluar dari *middle income trap* (MIT) menuju Indonesia Emas 2045. *Bappenas Working Papers*, 6(3), 392–419. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.237>